



Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan Sukarno Hatta – Giri Menang – Gerung, Telp. dan Fax. (0370) 6183006 Kode Pos 83363

Homepage : <http://www.lombokbaratkab.go.id>

Email : diskominfo.lombokbaratkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang - Gerung Telp. (0370) 6183001, Fax. 6813006 Kode Pos 83363

Website : www.lombokbaratkab.go.id

E-mail : sekretariat@lombokbaratkab.go.id

Gerung, 23 Maret 2018

6 Rajab 1439

Nomor: **550 / 44 / PPID-Lobar / III / 2018**

Lap. : 1 (satu) ekpl

H a l : Laporan Layanan Informasi dan
Dokumentasi (LLID) Tahun 2017

K e p a d a

Yth. Bupati Lombok Barat
di-

Giri Menang - Gerung

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 sebagai sesuatu yang penting dan strategis dalam menunjang pembangunan dan kemajuan daerah serta mendukung visi Lombok Barat yaitu Mewujudkan Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat yang dilandasi dengan nilai Patut Patuh Patju. Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik telah dijadikan prioritas dan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014 - 2019.

Mewujudkan keterbukaan informasi publik tersebut telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan PPID dalam Tahun 2017 dapat kami laporkan sebagai terlampir.

Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2017 berhasil memperoleh Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan tersebut diperoleh berkat bimbingan dan arahan Pimpinan dan Kerjasama PPID Pembantu (PPID SKPD) Lombok Barat. Guna mempertahankan prestasi tersebut sekaligus agar dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal diperlukan peningkatan kapasitas SDM, Sarana Prasana dan penganggaran yang memadai.

Demikian laporan kami untuk maklum dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

SEKRETARIS DAERAH

Sekretaris Asas PPID,

SETDA
Ir. H. MOH. TAUFIQ, M.Sc
Bendahara Utara Madya (IV/d)
NIP. 08090238 198603 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Informasi Pusat di Jakarta
2. PPID Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Komisi Informasi Provinsi NTB di Mataram
4. PPID Provinsi NTB di Mataram



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang - Gerung Telp. (0370) 6183001, Fax. 6813006 Kode Pos 83363

Website : www.lombokbaratkab.go.id

E-mail : sekretariat@lombokbaratkab.go.id

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Penerbitan regulasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 sebagai sesuatu yang penting dan strategis dalam menunjang pembangunan dan kemajuan daerah serta mendukung visi Lombok Barat yaitu Mewujudkan Lombok Barat yang *Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat* yang dilandasi dengan nilai Patut Patuh Patju. Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik telah dijadikan prioritas dan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat.

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik tersebut telah diterbitkan beberapa produk hukum sebagai komitmen dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tata kelola keterbukaan informasi publik itu sendiri. Produk hukum itu sendiri merupakan pedoman dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat.

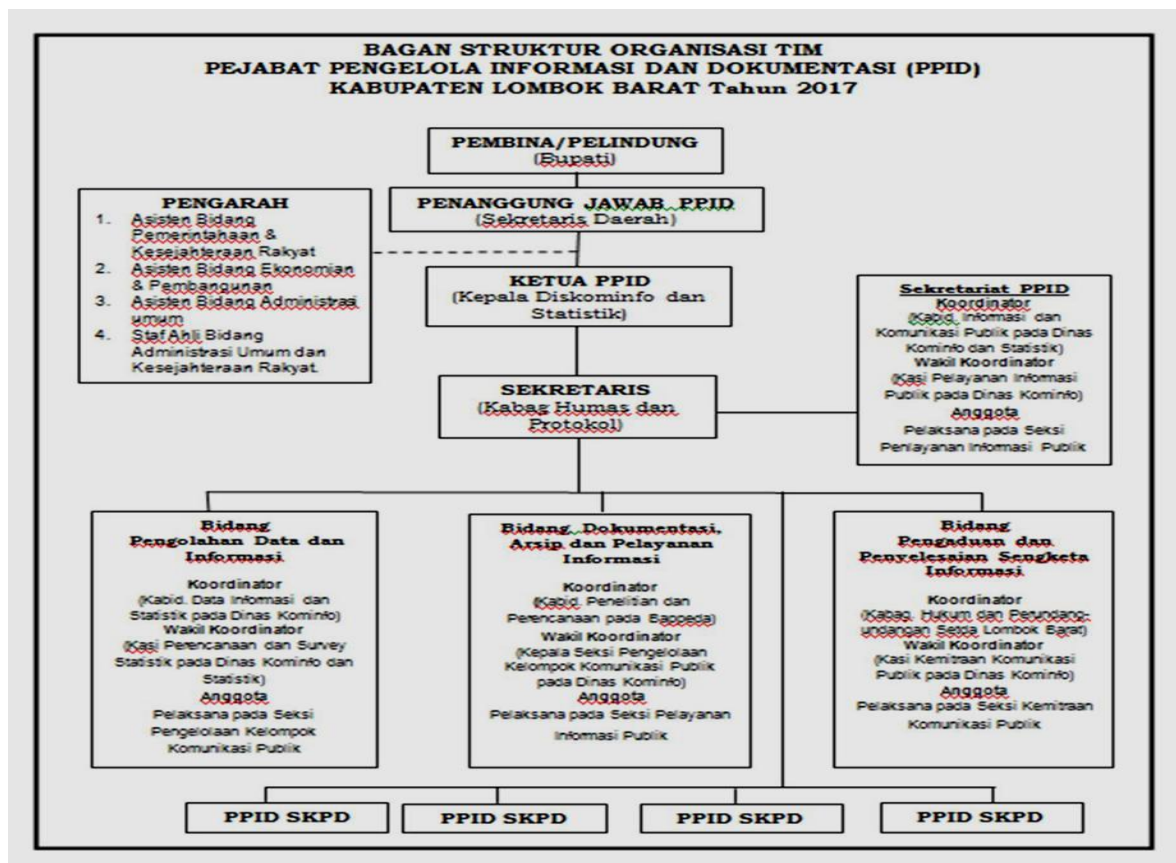
Produk hukum atau regulasi itu adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Lombok Barat
- 2) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- 3) Keputusan Bupati Lombok Barat No. 30A/800/DISKOMINFO/2017 ttg Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lombok Barat
- 4) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 33/1651/DISHUBKOMINFO/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- 5) Peraturan Bupati Lombok Barat No. 5 Tahun 2017 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- 6) Keputusan Bupati Lombok Barat No. 150/39/DISKOMINFO/2017 tentang Penetapan Pemingkatan PPID Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Dari Kebijakan tersebut telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang disebut PPID SKPD di setiap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Penetapan PPID SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD masing-masing

sekaligus selaku Atasan PPID SKPD tersebut.

Disamping itu telah pula diinisiasi pembentukan PPID Unit Layanan Terpadu (UPT) dibidang pendidikan dan kesehatan. PPID UPT bidang Pendidikan terbentuk di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lombok Barat. Sementara PPID UPT di Bidang Kesehatan telah di bentuk di semua Puskesmas yang ada atau sebanyak 17 Puskesmas yang ada Kabupaten Lombok Barat. Penetapan PPID UPT juga dengan keputusan Kepala SKPD sekaligus sebagai Atasan PPID yang tugasnya membantu PPID SKPD bersangkutan. Disamping itu telah terbentuk PPID di Desa sebanyak 40 Desa dari 119 Desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Adapun Struktur Organisasi PPID Utama Kabupaten Lombok Barat adalah :



Dilaporkan pula sejak tahun 2014 PPID Kabupaten Lombok Barat telah memperoleh beberapa prestasi antara lain : Peringkat I NTB pada tahun 2014, Peringkat III NTB pada tahun 2015, Peringkat VI NTB pada tahun 2016 dan Peringkat I NTB pada Tahun 2017.



2. Arah dan prioritas pelayanan Tahun 2017

Mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017, untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, kebijakan pengelolaan informasi publik diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Jabatan Fungsional untuk mengelola PPID yaitu Fungsional Arsiparis, Fungsional Komputer dan Fungsional Kehumasan.
- b. Mengadakan ruang sekretariat dan ruang pelayanan PPID
- c. Mengadakan pemeringkatan tingkat Kabupaten Lombok Barat sekaligus sebagai monitoring kegiatan dan menghadapi pemeringkatan tingkat provinsi NTB.
- d. Festival PPID Desa tingkat Provinsi NTB akan diadakan sekitar bulan September dan Oktober 2018. Aspek yang dinilai adalah website desa yang memuat tentang keterbukaan informasi publik. Website desa tersinkronisasi dengan website PPID atau Lombokbaratkab.go.id
- e. Pemeringkatan PPID tingkat Provinsi NTB diadakan bulan Oktober hingga Desember 2018
- f. Meningkatkan kapasitas pejabat pengelola informasi publik, dengan mengikuti pelatihan, diklat teknis dan atau sejenisnya, yang diselenggarakan sendiri maupun oleh instansi terkait di Provinsi NTB maupun di Luar Daerah.
- g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan membentuk PPID UPT dan PPID Desa/Kelurahan.
- h. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Petugas PPID baik di Utama, Pembantu maupun di unit-unit pelaksana memerlukan upaya sinergitas dan penyamaan persepsi antara PPID Utama, PPID SKPD dan Unit Pelaksana Tehnis dengan melakukan beberapa prioritas di tahun 2017 yaitu :
 - 1) Melakukan Rapat Kerja PPID dengan seluruh Anggota dan PPID SKPD termasuk PPID UPT.
 - 2) Meningkatkan jumlah informasi yang di upload di websit PPID Kabupaten Lombok Barat sebagai wujud pengumuman dan penyediaan serta pengelolaan informasi publik Kabupaten Lombok Barat.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sekretariat PPID Utama Kabupaten Lombok Barat berada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lombok Barat di Komplek Kantor Bupati Lombok Barat Jalan Soekarno Hatta No. 1 Giri Menang Gerung.

Sarana prasarana pelayanan informasi Publik di PPID Utama maupun Pembantu serta UPT Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 tersedia dan atau memanfaatkan sarana yang dimiliki.

Pada PPID Utama terdapat beberapa sarana perangkat keras seperti Komputer, Ruang Pelayanan dan Jaringan Internet. Sementara perangkat lunak seperti website juga tersedia dalam rangka memudahkan pelayanan.

No	Jenis Sarana	Diperlukan	Tersedia	Belum Tersedia
1	Desk Pelayanan	1 unit	1 unit	
2	Kursi Tamu	1 set	3 unit	
3	Computer	1 unit	1 unit	
4	Printer unit	1 unit	1 unit	

5	Aplikasi	1	1 unit	
6	Almari penyimpanan	1 unit	1 unit	
7	Ruang Kerja Refresentatif	1 lokal	1 unit	
8	Jaringan Internet	10 Mhz	1 unit	

Pada Tahun 2017 Sekretariat berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dimana terdapat ruang sekretariat dan pelayanan seperti nampak pada gambar sebagai berikut :





Disamping ruang pelayanan PPID Lombok Barat juga memiliki aplikasi pelayanan guna sebagai perangkat lunak memudahkan pelayanan informasi kepada pemohon sebagaimana tampak pada gambar berikut ini :

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pelayanan informasi publik tahun 2017 secara khusus tidak tersedia. Tugas PPID ditangani oleh yang mempunyai tugas dan fungsi bidang informasi dan humas.

SDM yang tersedia di PPID Utama yaitu sebagaimana yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lombok Barat No. 3A/800/Diskominfo/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat. SDM tersebut berjumlah 20 orang namun tersebar di unit kerja yang berbeda seperti di Bappeda, Humas, Arsip dan Perpustakaan dan di Diskominfo.

Selain itu sekretariat di pusatkan di Dinas Kominfo Lombok Barat tepatnya di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Karyawannya terdapat seorang Kepala Bidang, tiga Kepala Seksi dan dua orang staf di tambah 2 orang tenaga kontrak.

Sementara SDM di PPID SKPD juga secara khusus belum ada, masih dirangkap oleh personil yang mengerjakan tugas pokok.

Dampaknya setiap hari tidak ada yang standby di desk layanan setiap hari karena mengerjakan tugas pokok masing-masing.

Demikian pula di sekretariat belum ada staf sekretariat atau jabatan fungsional yang membantu. Semua masih di tangani oleh kepala sekretariat. Rekrutmen tenaga Sekretariat PPID Utama mengalami kesulitan dan mengangkat jabatan fungsional juga masih terkendala.

Kesimpulannya kualitas SDM PPID cukup mumpuni namun tidak dibantu dengan petugas teknis/staf yang mengerjakan tugas-tugas teknis.

Peningkatan personil SDM PPID juga dilakukan melalui kegiatan Rapat kerja sebagaimana gambar dibawah ini:





3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

Anggaran Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sangat didukung oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Terlihat pada APBD Tahun 2017 sudah mengalokasikan secara khusus untuk menunjang kegiatan PPID baik di PPID Utama dan beberapa di PPID SKPD. Pada PPID Utama sendiri dialokasikan anggaran sebesar Rp. 174.265.100 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus rupiah).

Sementara di PPID SKPD/Pembantu penganggarnya sebagai berikut :

No.	OPD/PPID Pembantu	Jumlah anggaran (Rp.)
1.	Bappeda	29.307.000
2.	Dukcapil	11.820.000
3.	Dispora	4665000
4.	Disperkim	11.400.000
5.	Dinas Pariwisata	32.797.000
6.	Dinas Sosial	1.000.000
7.	Camat Gunungsari	13.000.000
8.	Dinas Ketahanan Pangan	19.058.000
9.	DPRD Lombok Barat	49.561.750
Jumlah		172.608.750

PERKEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan informasi publik

Pemohon Informasi Publik di PPID Utama, SKPD dan UPT cukup banyak.

Sebelum melaporkan kegiatan jumlah permohonan kami juga melaporkan jumlah informasi yang diumumkan pada website ppid.lombokbaratkab.go.id

Daftar PPID SKPD yang paling banyak mengumumkan dan menyediakan dokumen

No.	PPID SKPD	Mengumumkan di Website	Menyediakan		Keterangan
			Softcopy	Hardcopy	
1	Sekretariat Daerah	140	X	X	
2	Sekretariat DPRD	2	X	X	

3	Inspektorat	80	X	X	
4	Dinas Dikbud	13	X	X	
5	Dinas Kesehatan	88	X	X	
6	Dinas Sosial	74	X	X	
7	Dinas PU TR	52	X	X	
8	Dinas Perkim	36	X	X	
9	Dinas Perhubungan	71	X	X	
10	Dinas Kominfo	101	X	X	
11	Dinas Dukcapil	269	X	X	
12	Dinas Koperasi dan UKM	27	X	X	
13	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan	150	X	X	
14	Dinas PM PTSP	29	X	X	
15	Dinas P2 KB P3A	33	X	X	
16	Dinas PMD	22	X	X	
17	Dinas LH	48	X	X	
18	Dinas Pora	13	X	X	
19	Dinas Pariwisata	104	X	X	
20	Dinas K P	9	X	X	
21	Dinas Pertanian	23	X	X	
22	Dinas Ketahanan Pangan	102	X	X	
23	Dinas Prindag	35	X	X	
24	Dinas Tenaga Kerja	31	X	X	
25	Dinas Pemadam Kebakaran	4	X	X	
26	Satpol PP	51	X	X	
27	Bappeda	178	X	X	
28	BKD dan PSDM	8	X	X	
29	BPKAD	98	X	X	
30	Badan Pendapatan Daerah	3	X	X	
31	BPBD	21	X	X	
32	Bakesbangpol	50	X	X	
33	Rumah Sakit Tripat	14	-	-	
33	Kecamatan Sekotong	-	-	-	
34	Kecamatan Lembar	1	X	X	
35	Kecamatan Gerung	111	X	X	
36	Kecamatan Labuapi	35	X	X	
37	Kecamatan Kuripan	3	X	X	
38	Kecamatan Kediri	37	X	X	
39	Kecamatan Narmada	32	X	X	
40	Kecamatan Lingsar	23	X	X	
41	Kecamatan Gunungsari	14	X	X	
42	Kecamatan Batulayar	46	X	X	
JUMLAH		2.446			

Permohonan di PPID Utama untuk tahun 2017 cukup banyak sekali permohonan informasi yang di terima dan dilaksanakan seperti terlihat dalam table berikut ini :

Jenis Informasi	Jumlah Pengakses	Cara Akses		Waktu Mendapatkan		Pemberian Informasi			Alasan Penolakan (Jika Terjadi)
		Web Site	Desk layanan	< 10 HK	> 10 HK	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
Kebijakan	8.229	670	7.559	7.635	594	8.229	7	0	
Perencanaan	1.369	402	967	1290	79	1.364	22	0	
Keuangan	6.560	6.264	296	6.457	103	6.558	5	0	
Pengadaan	1.171	1.020	151	1.071	100	1.161	42	0	
Pelayanan	89.699	1.989	87.710	88.556	1.143	89.693	34	0	
Perijinan	2.266	1.263	1.003	1.826	440	2.259	19	0	
Personal	1.927	1.343	584	1.896	31	1.921	10	0	
Lainnya	2.908	2.094	814	1.870	1.038	2.904	4	0	
Jumlah	114,129	15,045	99,084	110,601	3,528	114,089	142	0	

Dirinci Per bulan sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Pemohon	Pemohon Informasi	
		Personal	Lembaga
Januari	5.809	5.441	368
Februari	9.212	8.561	651
Maret	15.226	14.135	1.091
April	13.833	11.727	2.106
Mei	13.241	12.949	292
Juni	5.569	4.985	584
Juli	15.355	14.403	952
Agustus	14.600	11.000	3.600
September	5.731	4.647	1.084
Oktober	4.370	3.781	589
November	5.989	5.707	282
Desember	5.194	4.438	756
Jumlah	114,129	101,774	12,355

Kalau dilihat dari Jumlah SKPD/OPD yang melaporkan terlihat permohonan sebagai berikut :

No	SKPD/OPD	TOTAL	Website	Desk Layanan
1	KECAMATAN KEDIRI	10016	0	10016
2	KECAMATAN LINGSAR	6433	474	5959
3	KECAMATAN LEMBAR	61651	0	61651
4	KECAMATAN NARMADA	10016	0	10016
5	KECAMATAN BATULAYAR	31	0	31
6	KECAMATAN LABUAPI	6694	0	6694
7	KECAMATAN GUNUNGSARI	61	0	61
8	KETAHANAN PANGAN	30	0	30
9	DUKCAPIL	58	0	58
10	BAPPEDA	35	0	35
11	BAPENDA	99	0	99
12	DPMPD	105	0	105
13	BAKESBANGPOL	10	0	10
14	DINAS PARIWISATA	104	0	104
15	DINAS PU DAN PTR	117	46	71
16	DINAS KESEHATAN	195	0	195
17	DINAS KOPERASI DAN UKM	58	0	58
18	DISPERINDAG	97	0	97
19	DINAS SOSIAL	8367	7385	982
20	DPR	96	0	96
21	BPBD	35	0	35
22	INSPEKTORAT	42	8	34
23	DINAS PERHUB	55	0	55
24	ASSET	118	0	118
25	BKD DAN PSDM	2214	2070	144
26	DISPERKIM	358	281	77
27	DISPORA	236	236	0
28	DPM-PTSP	6467	4545	1922
29	DPPKBPPPA	331	0	331
JUMLAH		114129	15045	99084

Dari tabel di atas terlihat keaktifan dari semua PPID SKPD/OPD dalam melaksanakan pelayanan informasi publik di tempatnya. Namun tidak dipungkiri masih ada SKPD yang belum melaksanakan pelayanan atau belum ada yang meminta informasi di tempatnya.

Disamping itu terlihat juga bahwa jumlah pemohon dari individu dan lembaga tidak berimbang dimana secara individu yang meminta informasi sebanyak 83.789 dan lembaga sebanyak 11.626 orang dari jumlah 95.415 orang.

Demikian pula kalau dilihat dari jumlah yang memohon dari website dan des layanan secara langsung tampak terlihat tidak berimbang. Lebih banyak yang memohon informasi secara langsung yaitu 87.755orang sedangkan melalui website hanya 7.660orang dari 95.415 orang.

Sedangkan kalau dilihat dari permohonan informasi perbulan dari setiap SKPD/OPD terlihat angka sebagai berikut :

OPD	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	TOTAL
KECAMATAN KEDIRI	899	826	1060	776	811	503	955	987	812	728	803	856	10016
KECAMATAN LINGSAR	472	459	551	548	492	438	698	558	552	524	675	466	6433
KECAMATAN LEMBAR	1598	4932	9622	9541	8798	2355	10416	9577	1384	835	1287	1306	61651
KEC. NARMADA	852	826	1060	776	861	548	955	987	962	728	803	658	10016
KEC.N BATULAYAR	1	4	2	3	5	9	0	2	1	1	3	0	31
KECAMATAN LABUAPI	598	426	621	554	368	365	844	680	539	545	634	520	6694
KEC. GUNUNGSARI	9	8	9	4	6	5	3	4	5	0	1	7	61
KETAHANAN PANGAN	8	6	2	4	3	2	1	2	1	1	0	0	30
DUKCAPIL	1	5	11	9	5	1	5	7	8	5	1	0	58
BAPPEDA	3	3	5	1	1	5	2	1	8	4	2	0	35
BAPENDA	22	6	4	10	14	11	1	0	16	3	4	8	99
DPMPD	6	7	10	12	10	7	10	0	9	8	7	9	95
BAKESBANGPOL	0	1	0	3	1	3	0	1	0	0	1	0	10
DINAS PARIWISATA	8	15	6	21	4	1	4	19	6	0	5	12	101
DINAS PU DAN PTR	1	2	5	8	11	17	16	17	15	12	10	3	117
DINAS KESEHATAN	22	17	27	9	19	8	18	17	8	6	26	18	195
DINAS KOPERASI UKM	4	3	3	3	5	6	8	3	3	8	3	9	58
DISPERINDAG	0	6	6	13	14	15	5	5	20	5	4	4	97
DINAS SOSIAL	467	976	1467	865	476	387	673	647	689	222	985	513	8367
DPR	25	8	5	12	5	5	7	8	7	6	4	4	96
BPBD	5	4	3	2	1	3	2	3	2	3	2	5	35
INSPEKTORAT	4	5	1	7	4	3	4	4	4	4	2	0	42
DINAS PERHUB	5	3	0	0	0	0	2	0	0	45	0	0	55
ASSET	10	14	11	7	11	7	11	12	5	12	9	9	118
BKD DAN PSDM	206	34	167	56	703	286	30	369	63	28	76	196	2214
DISPERKIM	9	57	4	24	30	9	64	71	21	32	23	14	358
DISPORA	20	9	7	17	32	21	68	21	11	9	17	4	236
DPM-PTSP	538	539	539	537	538	537	540	538	541	540	539	541	6467
DPPKBPPPA	16	11	18	11	13	12	13	50	39	53	63	32	331
JUMLAH	5809	9212	15226	13833	13241	5569	15355	14590	5731	4367	5989	5194	114116

Dilihat dari tabel di atas nampak merata memohon informasi publik setiap bulannya, namun pada SKPD dan atau OPD tidak merata karena ada yang banyak dan ada yang sedikit bahkan masih terlihat permohonan informasi tidak ada atau 0 alias nihil.

Khusus Pelayanan di PPID melalui website kita bisa ketahui jumlah yang pernah membaca dan mendownload informasi dan dokumentasi yang tertayang yaitu sebagai berikut:

No.	OPD/PPID SKPD	Baca	Download
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17468	4338
2	Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju	4656	1198
3	Dinas Kesehatan	24964	6730
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26844	4992
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4261	1600
6	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4506	973
7	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	35418	4756
8	Dinas Pemadam Kebakaran	1599	391
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	10787	2318
10	KECAMATAN Batu Layar	14567	2995
11	KECAMATAN Gunungsari	5236	1380
12	KECAMATAN Lingsar	8226	1846
13	KECAMATAN Narmada	6628	2112
14	KECAMATAN Kediri	6611	1464
15	Sekretariat Dewan	649	249
16	KECAMATAN Labuapi	11304	1738
17	KECAMATAN Kuripan	837	295
18	KECAMATAN Gerung	11359	4804
19	KECAMATAN Lembar	299	81
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	3526	963
21	Dinas PARIwisata	29699	5721
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10681	2027
23	Dinas Pertanian	8538	1951
24	Dinas Ketahanan Pangan	24893	5546
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	43967	7712
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7449	2359
27	Inspektorat Kabupaten	22902	3720
28	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2666	778
29	Badan Pendapatan Daerah	952	253
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6211	1451
31	PPID Utama	48780	11352
32	Satuan Polisi Pamong Praja	15990	3120
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16251	3533
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9334	2073
35	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9254	1829
36	Dinas Sosial	21914	4580
37	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9025	2638
38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	63329	12535

39	Dinas Lingkungan Hidup	15203	3381
40	Dinas Perhubungan	22275	5943
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	53302	12480

Dilihat dari tabel di atas nampak merata memohon informasi publik pada setiap badan publik.

Banyaknya yang membaca dan mendownload DIP di website PPID belum diimbangi dengan permintaan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang disiapkan di website maupun di desk layanan informasi. Di website hanya beberapa saja yang memohon informasi dengan menggunakan formulir permohonan yaitu sebagai berikut :

Permintaan Data



Sebelum melakukan permintaan DIP silakan lihat semua daftar informasi publik kami yang sudah di upload [disini](#) atau silakan melakukan pencarian DIP pada kotak pencarian diatas. Jika informasi tidak tersedia silakan anda mengajukan permohonan informasi [disini](#)

Untuk permintaan secara langsung ke Kantor PPID silakan mengisi formulir yang dapat di [download disini](#)

Lacak Permintaan Data

Permintaan Data Terbaru

NO	Nama	Tujuan Permintaan Data	Rincian	Tanggal	Status
1	dwi septa mulyadi	untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan	lowongan pekerjaan sebagai dokter jaga ugd di rsud tripat	10 Desember 2017	Belum Diproses
2	Rian Sani	Bahan Menulis Skripsi	Dasar Hukum PPID	21 Juni 2017	Diberikan
3	Rima Desy Yarasari, SE	Mngetahui usulan proposal	Daftar Hibah Lombok Barat 2017	31 Mei 2017	Diberikan
4	Hidayati	Bahan meulis Skripsi	APBD Tahun 2016	25 Mei 2017	Diberikan

NO	Nama	Tujuan Permintaan Data	Rincian	Tanggal	Status
5	B. Mila Damayanti	Bahan Kajian keterbukaan informasi publik	Laporan Tahunan PPID 2016	02 Maret 2017	Diberikan
6	Juantara Dinata	Bahan menulis Skripsi	Data Pegawai Lombok Barat	03 April 2017	Diberikan
7	Agasthya	Pemintaan data untuk laporan keuangan	LRA 2017	12 September 2017	Ditolak
8	Made darma yoga	Untuk keperluan bahan skripsi	Perda Kabupaten Lombok Barat tentang pemungutan pajak reklame	11 September 2017	Diberikan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

RINCIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan pelayanan informasi Publik pada PPID Utama dan seluah SKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017, belum ada sengketa terhadap informasi publik. Seluruh permintaan terhadap informasi maupun dokumentasi, sepanjang tersedia dapat dipenuhi sesegera mungkin dan dalam waktu kurang dari 10 hari. Namun karena terlalu banyaknya permintaan data maka terlihat pelayan dilayani banyak yang melebihi dari 10 hari kerja yaitu sekitar tiga ribuan.

KENDALA INTERNAL DAN EKTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

Kendala internal dalam pelayanan informasi publik di Kabupaten Lombok Barat antara lain adalah :

1. Belum adanya pejabat Fungsional yang membantu petugas PPID
2. Sekretariat PPID Utama belum ada berikut staf secretariat.
3. SIP PPID masih belum di manfaatkan PPID SKPD untuk mengumumkan Inforamasi.
4. Sarana Prasarana penunjang masih kurang.

B. Kendala Ekternal

Adapun kendala ekternal tidak terlalu banyak kendala. Hanya masyarakat belum familier untuk meminta informasi. Masyarakat yang meminta informasi sering langsung ke PPID SKPD mapun ke UPT. Permintaan informasi itu karena lebih cepat dapat karena langsung ke narasumbernya.

REKOMENDASI DAN RENCA TINDAK LANJUT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rencana tindak lanjut atau progress kegiatan yang akan dilakukan dalam menerapkan Keterbukaan informasi public di Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Meningkatkan Anggaran PPIDbaik PPID Utama maupun PPID Pembantu
2. Meningkatkan Pertemuan Pengurus PPID dalam rangka Sinkronisasi Kegiatan
3. Mengangkat Pejabat Fungsional untuk membantu petugas PPID
4. Membangun Gedung Sekretariat PPID sehingga pelayanan informasi dapat berjalan lancar dan PPID menjadi familier.
5. Meningkatkan kapasitas pejabat pengelola informasi publik, dengan mengikuti pelatihan, diklat teknis dan atau sejenisnya, yang diselenggarakan sendiri maupun oleh instansi terkait di Provinsi NTB maupun di Luar Daerah.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan membentuk PPID UPT dan PPID Desa/Kelurahan.

Demikian laporan ini untuk maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik ini kami sampaikan terima kasih.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. Budi Darmajaya, MM
Ketua